

Buku

- Abdoellah, P. S. (2016). *Revitalisasi Kewenangan PTUN*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Cahyawati, D. P. (2012). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha*. Depok: Gramata Publishing.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghaia Indonesia.
- Idrus, M. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Jonaedi Effendy & Johnny Ibrahim. (2016). *Penelitian Hukum Noermatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Grup.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Prints, D. (1995). *Strategi Menangani pada Perkara Tata Usaha negara*. Bandung: Aditya Bakti.
- Qamar, D. (2011). *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ronny Hanitijo Soemitro, S. (1990). *Metodologi Penulisan hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siringoringo, D. (2011). *Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soetami, A. S. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Trimulan, Titik dan Dr. H. Ismu Gunadi Widodo. (2014). *Hukum Tata Usaha Negara dan hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana Prenamedia grup.
- Wiyono, R. S. (2013). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara(edisi ketiga)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Putriyanti, A. (2015 Vol 10 No 02). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pandecta* , 189-190.

Perundang –Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang- Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Artikel

Kholis, M. N. (2014, July 01). *Pembuktian PTUN (diatur dalam Pasal 100-107)*. Retrieved from wordpress.com: <https://kholisjee.wordpress.com>

NN. (2015, January 13). *Jenis Jenis Informasi Publik*. Retrieved from pemerintah.net: <http://pemerintah.net/jenis-jenis-informasi-publik>

Sahbani, A. (2011, 12 23). *Putusan KIP bukan Putusan Badan Peradilan*. Retrieved from [hukumonline.com: http://www.hukumonline.com/berita/baca/It4ef44be41abde/putusan-kip-bukan-putusan-badan-peradilan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/It4ef44be41abde/putusan-kip-bukan-putusan-badan-peradilan)

LAMPIRAN



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

Jl. Abdulrahman Saleh Nomor 89
Telp. (024) 7607413 Fax. (024) 7613310 Semarang – 50145
Website : www.ptun-semarang.go.id

Semarang, 5 Maret 2018

Nomor : W3.TUN2/ *390* /KP.09.01/3/2018
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
di -
S e m a r a n g

Sehubungan dengan Surat Saudara tertanggal 27 Februari 2018
Nomor : 70.3/UN7.5.1/DL/2018 perihal seperti tersebut pada pokok surat, pada dasarnya kami tidak
keberatan menerima mahasiswa a.n. Anestasia Kudadini melaksanakan program tersebut di instansi kami
(waktu, jumlah dan nama mahasiswa sesuai dengan surat permohonan).

Perlu kami informasikan bahwa peserta riset selama melakukan kunjungan agar dapat mentaati
tata tertib dan peraturan pada instansi kami.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KETUA,



Herry Wibawa
HERRY WIBAWA, SH., MH.
NRP. 19570805 198203 1 006

Tembusan:
1. Peninggal

